

LAPORAN REVIU SOP



**KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
KKP KELAS I MAKASSAR**

KATA PENGANTAR

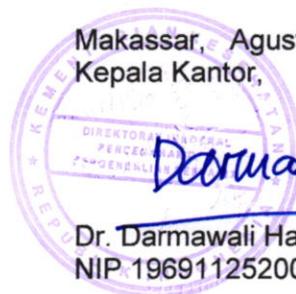
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmat-Nya, Laporan Reviu SOP ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam mendukung pembangunan kesehatan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi terselenggaranya *Good Government*.

Laporan Reviu SOP secara berkala KKP Kelas I Makassar ini cukup penting dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai percepatan waktu pelayanan serta efisiensi dan efektivitas SOP yang ada di KKP Kelas I Makassar. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan reviu SOP waktu layanan seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang reviu waktu pelayanan publik yang ada.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran KKP Kelas I Makassar baik fungsional lain dan personil manajerial maka pelayanan publik yang ada dapat terlaksana dengan baik. Semoga layanan publik yang ada di KKP Kelas I Makassar dapat terlaksana lebih baik lagi dan tepat sasaran sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan *stakeholders*.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Makassar, Agustus 2020
Kepala Kantor,



Dr. Darmawali Handoko, M.Epid
NIP. 196911252002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN	4
BAB III PENUTUP	9
3.1 Kesimpulan.....	9
3.2 Saran	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan *good governance* (pemerintahan yang baik) diperlukan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Negara sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, program-program pembangunan masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat. Sehingga perlu untuk menetapkan peta proses bisnis dan SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai acuan untuk Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan menjamin kelancaran, serta transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan pelayanan internal dan eksternal unit organisasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, perlu menyusun standar operasional prosedur. Pengertian SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP merupakan standar yang dijadikan acuan dalam proses penyelesaian setiap judul kegiatan dalam organisasi. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan SOP merupakan suatu keharusan dan perlu dilakukan evaluasi minimal satu tahun sekali untuk perbaikan.

Pelaksanaan reviu SOP harus dilakukan secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam setiap upaya reviu SOP akan menjadi bahan yang berharga dalam percepatan dan evaluasi sehingga penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan. Proses ini harus diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang

tercantum dalam Standar Pelayanan Publik, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasilpenerapan atau menyediakan dukungan tambahan.

Untuk itu, sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dengan melakukan reuiu SOP secara berkala.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukan reuiu SOP adalah:

1. Melakukan perbaikan layanan publik kepadapengguna;
2. Mempercepat pelayanan public kepadapengguna;
3. Memudahkan pengguna dalam mengakses pelayanan publik yangada;
4. Menghasilkan inovasi baru untuk kepuasan pelayanan kepadapengguna;
5. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakantugas;
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugasdan tanggungjawab;
7. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaantugas;
8. Menciptakan ukuran standar kinerja untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telahdilakukan;
9. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagaisituasi;
10. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu danprosedur;
11. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

BAB II PEMBAHASAN

Tim evaluasi penerapan Standar Operasional Prosedur Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar telah melakukan Reviu secara berkala untuk 26 Standar Operasional Prosedur Bidang PRL yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Nomor : HK.01.07/1/2855/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Reviu SOP tersebut diantaranya sebagaiberikut:

I. SOP BIDANG PRL

NO	Nama SOP	No Dokumen SOP Semula	Nomor Dok SOP Menjadi
1.	Pengawasan Hygiene Sanitasi Kapal	OT.02.02/3/4225/2019	Tidak ada perubahan SOP
2.	Pengawasan Pencemaran Udara	OT.02.02/3/4230/2019	Tidak ada perubahan SOP
3.	Pengawasan Penyediaan Air Bersih/Minum	OT.02.02/3/4229/2019	Tidak ada perubahan SOP
4.	Pengendalian Kecoa	OT.02.02/3/4219/2019	Tidak ada perubahan SOP
5.	Pengendalian Nyamuk <i>Aedes Aegypti</i>	OT.02.02/3/4217/2019	Tidak ada perubahan SOP
6.	Pengendalian Tempat Pengelolaan Pestisida	OT.02.02/3/4220/2019	Tidak ada perubahan SOP
7.	Tindakan Penyehatan Kapal/Pesawat (Disinseksi)	OT.02.02/3/4222/2019	Tidak ada perubahan SOP
8.	Tindakan Penyehatan Kapal/ Pesawat (Fumigasi)	OT.02.02/3/4223/2019	Tidak ada perubahan SOP
9.	Pengendalian Tikus dan Pinjal	OT. 02.02/3/4221/2019	Tidak ada perubahan SOP
10.	Pengawasan Pencemaran Air Limbah	OT.02.02/3/4228/2019	Tidak ada perubahan SOP
11.	Pengendalian Lalat	OT.02.02/3/4218/2019	Tidak ada perubahan SOP
12.	Pengawasan Hygiene Sanitasi Kapal	OT.02.02/3/4225/2019	Tidak ada perubahan SOP
13.	Pengamanan Makanan dan Minuman	OT.02.02/4226/2019	Tidak ada perubahan SOP
14.	Pengawasan Hygiene Sanitasi Gedung, Bangunan dan Perusahaan	OT.02.02/3/4224/2019	Tidak ada perubahan SOP
15.	Prosedur Pengawasan Higiene Sanitasi Pesawat	OT.02.02/3/2775/2020	Tidak ada perubahan SOP
16.	Pengawasan Kualitas Air Laut	OT.02.02/3/2821/2020	Tidak ada perubahan SOP
17.	Pengawasan Kualitas Tanah	OT.02.02/3/2822/2020	Tidak ada perubahan SOP
18.	Pengawasan Hygiene Peralatan Makanan dan Minuman/Usap Alat Makan dan Minum	OT.02.02/3/2823/2020	Tidak ada perubahan SOP
19.	Pengawasan Penjamah Makanan di Rumah Makan/Restoran/Jasa Boga	OT.02.02/3/2824/2020	Tidak ada perubahan SOP
20.	Pengawasan Kepadatan Lalat	OT.02.02/3/2815/2020	Tidak ada perubahan SOP
21.	Pengawasan Kepadatan Tikus dan Pinjal di Wilayah Bandara/Pelabuhan	OT.02.02/3/2816/2020	Tidak ada perubahan SOP

22.	Pengawasan Jentik	OT.02.02/3/2817/2020	Tidak ada perubahan SOP
24.	Pengawasan Nyamuk Dewasa/Survey Nyamuk	OT.02.02/3/2818/2020	Tidak ada perubahan SOP
25.	Pengawasan Kepadatan Kecoak di TPM Bandara/Pelabuhan	OT.02.02/3/2819/2020	Tidak ada perubahan SOP
26.	Pengawasan Vektor di Pelabuhan/ Bandara	OT.02.02/3/2820/2020	Tidak ada perubahan SOP

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Reviu SOP diharapkan dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam hal pelayanan publik di KKP Kelas I Makassar. Diantaranya dengan menambah kegiatan menyesuaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Dari hasil reviu SOP ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih efisien dan efektif sehingga mempermudah pengguna dalam memanfaatkan layanan yang ada di BPOL.

3.2 Saran

Reviu SOP untuk pelayanan publik di lingkup KKP Kelas I Makassar perlu dilakukan secara berkala setahun sekali untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pelayanan public sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik di KKP Kelas I Makassar.